



BERADAPTASI DI MASA TRANSISI

LAPORAN TAHUNAN 2020



Daftar Isi

- 04 | Kata Pengantar Direktur Eksekutif
- 05 | Tentang MDPI
- 06 | Highlights
- 08 | Wilayah Kerja MDPI
- 10 | Marine Stewardship Council
- 12 | Fisheries Improvement
- 18 | Jangkauan & Capaian MDPI
- 20 | Fisheries Community Organization
- 24 | Beradaptasi di Tengah Pandemi
- 26 | Fair Trade USA Implementation
- 28 | INVEST Project
- 30 | Penggerak Ekosistem Perikanan
- 32 | PT Sahabat Laut Lestari
- 34 | Tim Kerja MDPI
- 36 | Operasional & Keuangan

Laporan Tahunan 2020 MDPI
© 2020 MDPI. Hak Cipta Dilindungi.

Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Ruko Istana Regency Blok S No.7
Jl. Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran
Denpasar 80223, Bali, Indonesia
Phone: (+62 361) 471 9020
Email: info@mdpi.or.id
www.mdpi.or.id

 Masyarakat Dan Perikanan Indonesia
 @mdpi_foundation
 @MDPIIndonesia
 Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
 Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia



Di tengah ketidak-pastian yang melanda dunia, berbagai hal positif berhasil dicapai dan kami pun menjadi semakin yakin bahwa pendekatan yang diterapkan MDPI begitu berharga dalam menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. »

Yasmine Simbolon
Direktur Eksekutif MDPI

KATA PENGANTAR

Seperti yang dialami oleh seluruh dunia, tahun 2020 telah mengubah kebiasaan kita semua menuju tatanan baru (*new normal*), dengan semua penyesuaian yang harus dilakukan setelah mewabahnya pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19). Perjalanan dibatasi, *work from home* diterapkan, interaksi virtual melalui aplikasi video harus dibiasakan; bagi MDPI yang bekerja dan berinteraksi langsung dengan seluruh elemen masyarakat perikanan, baik nelayan, perusahaan maupun pemerintah, semua kegiatan selama masa pandemi dijalankan dengan penuh adaptasi dan improvisasi. Meski demikian, kami bersyukur karena masih dapat mengerahkan tenaga dan sumber daya, melanjutkan implementasi program, dan masih tetap memastikan kesehatan staf maupun kelompok masyarakat di wilayah kerja MDPI tetap terjaga.

Di tengah ketidak-pastian yang melanda dunia, berbagai hal positif berhasil dicapai dan kami pun menjadi semakin yakin bahwa pendekatan yang diterapkan MDPI—bekerja dan tinggal di tengah komunitas masyarakat—begitu berharga dalam menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. MDPI terus mendampingi kelompok nelayan Fair Trade, termasuk dalam menjalankan program tanggap darurat menggunakan Dana Premium yang awalnya dialokasikan untuk berbagai program lainnya. Penerapan strategi baru MDPI untuk 2020-2025 tetap bergulir: tahun ini MDPI menghadirkan dua staf senior baru (Direktur Eksekutif dan Direktur Program) sebagai upaya

untuk memperkuat kapasitas operasional; program baru terkait pengorganisasian masyarakat mulai dijalankan, dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas untuk staf MDPI sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan asesmen untuk mengidentifikasi *Champion* dan desa baru yang akan didampingi di 12 lokasi yang tersebar di 6 provinsi. Kerjasama antara MDPI dengan para mitra industri dan Komite Nelayan Fair Trade di Pulau Buru, Maluku berhasil menggapai sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) pertama di dunia untuk *handline yellowfin tuna* yang resmi diterima pada Mei 2020. Meski di masa pandemi, kami telah mengumpulkan 447 ton data *port sampling* yang juga dibagikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai elemen dalam pengembangan *Harvest Strategy*, berhasil melaksanakan 6 pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, turut memfasilitasi peluncuran Program Pelayanan SAMSAT Perizinan Kapal Perikanan di Lombok Timur Provinsi NTB, hingga membentuk sejumlah 7 Koperasi Nelayan demi mengakselerasi kemandirian nelayan. Beberapa kegiatan besar lainnya terpaksa dilakukan secara virtual, seperti Audit Tahunan Fair Trade dan pelatihan pemberdayaan perempuan bersama para penjual ikan di 3 lokasi di Sulawesi Utara.

Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada para mitra, donor dan rekan MDPI lainnya atas dukungan yang tiada henti. MDPI terus mencoba untuk mewujudkan makna kata “masyarakat” yang menjadi bagian dari nama organisasi kami, dengan berupaya mencakup wilayah dampingan yang lebih luas, melakukan terobosan yang lebih positif, demi terus meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia. - Jaz



VISI

Masyarakat perikanan yang maju berkembang dan berperan aktif, serta dapat memimpin dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

MISI

Memperkuat masyarakat perikanan untuk mencapai keberlanjutan dengan mendukung pengorganisasian masyarakat dan memanfaatkan kekuatan pasar.

MDPI didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk mendorong kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kesejahteraan komunitas nelayan dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia.

Moto kami adalah “happy people, many fish”. Organisasi kami dibentuk atas dasar kepercayaan yang sederhana: bahwa masyarakat perikanan yang diberdayakan dan terjamin secara finansial adalah kunci dalam mencapai perikanan berkelanjutan. Kami bekerja dengan perikanan skala kecil demi mendorong rantai pasok *seafood* yang berkelanjutan, adil dan dapat dilacak. MDPI bertujuan untuk mendapatkan hasil jangka panjang yang nyata dan dapat bertahan dalam kelompok masyarakat yang kami libatkan.



HIGHLIGHTS

Sertifikasi Marine Stewardship Council

MDPI turut berbangga atas pemberian sertifikat Marine Stewardship Council (MSC) untuk *yellowfin tuna handline* Pulau Buru, Provinsi Maluku dengan Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra serta Komite Nelayan Fair Trade Buru sebagai pemegang sertifikat bersama. Sertifikat yang diperoleh tanggal 12 Mei 2020 ini merupakan yang pertama di dunia diberikan kepada nelayan kecil. Selengkapnya di halaman 10.

Pembentukan Koperasi Nelayan

Sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan, MDPI turut menjadikan pembentukan Koperasi sebagai salah satu fokus program kerja. Tahun 2020 melihat terbentuknya beberapa Koperasi nelayan di bawah binaan MDPI, yakni di Buru Provinsi Maluku, Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Selengkapnya di halaman 23.

Perikanan Skala Kecil Indonesia dalam Jurnal FAO

Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerbitkan jurnal komprehensif tentang perikanan berkelanjutan skala kecil. Jurnal ini mendedikasikan bagian khusus untuk sertifikasi Fair Trade (FT) perikanan *handline* tuna sirip kuning di Indonesia, sebuah program yang telah diimplementasikan oleh MDPI sejak 2013. Jurnal FAO ini berisikan materi terperinci tentang penerapan FT dalam rantai pasokan perikanan, termasuk para pelaku perikanan yang bekerja sama dengan MDPI dalam memenuhi dan menjaga standar FT hingga saat ini. *Fair Trade: Certification of a yellowfin tuna handline fishery in Indonesia* dapat dibaca pada Bagian 6, halaman 105-121.

Public-Private Partnership Program

MDPI turut berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan tentang Public-Private Partnership Program yang diselenggarakan oleh Ditjen PDSKP baik di Jakarta dan Bali, dan menyampaikan Kerja Sama Pemerintah (KKP dan DKP Provinsi) – Nelayan – Pemasok – Unit Pengolahan Ikan yang telah memperoleh Sertifikasi FT dan MSC, sebagai salah satu contoh *Partnership Program* yang berhasil di Indonesia.



Nelayan “Pejuang Laut” USAID SEA

Di bawah binaan USAID SEA, wilayah Maluku dan Maluku Utara mendapatkan 4 nelayan *Champion* baru setelah mengikuti pelatihan di Ambon, Provinsi Maluku pada 27-30 Januari 2020. Beberapa fokus rencana para Pejuang Laut ini adalah menggiatkan pengisian *Fisher Log* dan *Endangered/Threatened/Protected (ETP) Log*, melakukan sosialisasi tentang satwa dilindungi, pembuatan rumpun dan bersih pantai rutin.

Workshop Ketelusuran Berbasis Sistem Elektronik

MDPI mendapatkan kesempatan berbagi informasi di beberapa lokakarya bertema ketelusuran, salah satunya di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta bersama para Taruna Tingkat IV. Pada 13 Februari 2020, beberapa perwakilan MDPI yang juga merupakan alumni STP Jakarta turut berbagi pengalaman dan studi kasus terkait ketelusuran berbasis teknologi di industri perikanan Indonesia agar para Taruna dapat lebih memahami seputar sistem ketelusuran sebelum berangkat ke tempat Praktik, juga sebagai bekal Taruna/i tingkat IV dalam Karya Ilmiah Praktek Akhir (KIPA). Selain itu, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, MDPI juga mengadakan lokakarya untuk membahas upaya pengembangan ketelusuran pada perikanan Indonesia, dengan menggunakan sistem elektronik. Kegiatan yang diadakan di Bogor pada 7-8 Desember 2020 ini juga membahas prinsip dan standar ketelusuran yang berlaku di pasar internasional serta informasi seputar teknologi pengumpulan dan penyimpanan data perikanan.

Pembuatan Video “Small-Scale Fisheries Go International”

Bersama dengan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, MDPI memfasilitasi pembuatan video tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia yang turut melibatkan nelayan Fair Trade dan MSC di Pulau Buru, Maluku. Video dapat ditonton melalui tautan berikut: <http://bit.ly/SSFIndoBuru>



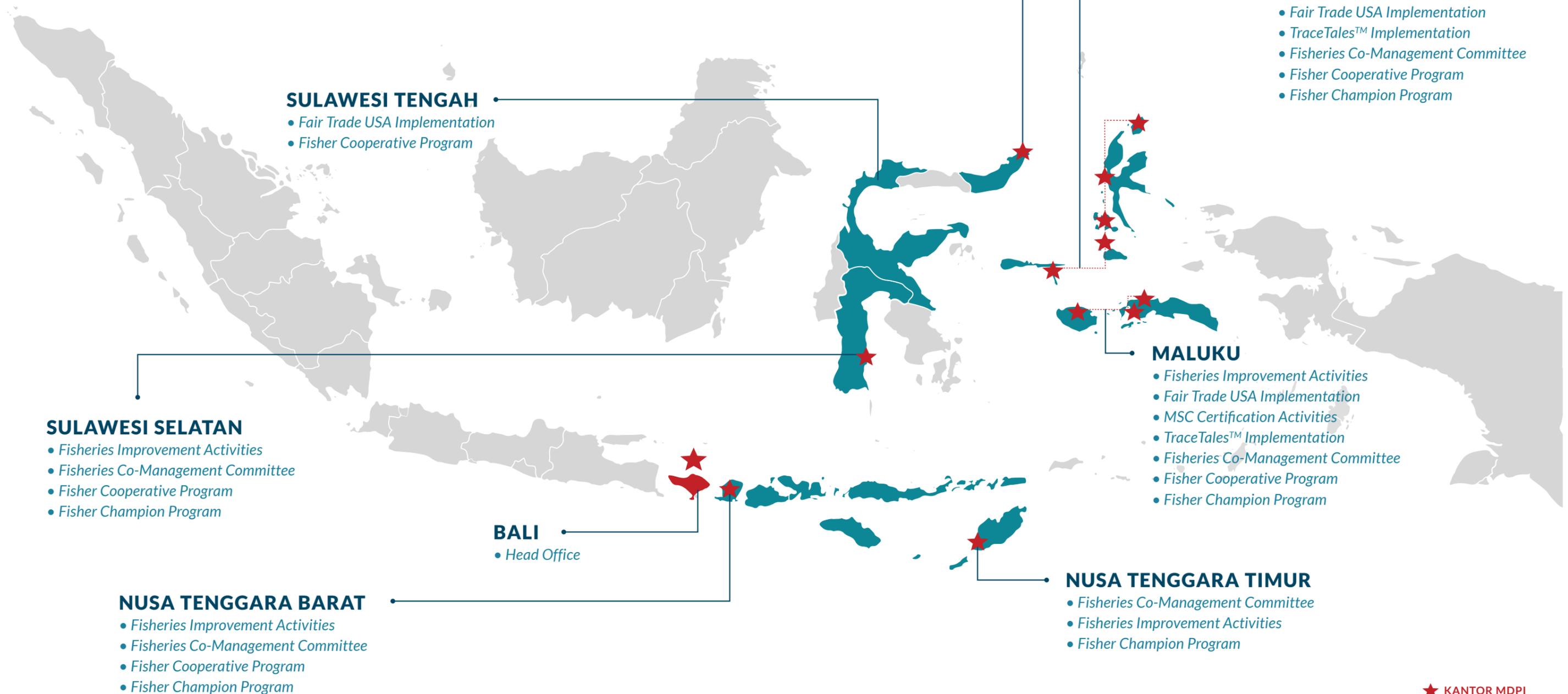
MDPI Staff Dinner

Bertepatan dengan kegiatan pelatihan Pengorganisasian Masyarakat untuk seluruh staf lapangan, tim Operasional MDPI turut mengadakan acara makan malam di hari terakhir pelatihan pada 18/12/2020 di Bali. Seluruh staf MDPI sebelumnya rutin berkumpul di acara *Annual Gathering* yang diadakan setiap akhir tahun, namun kali ini menjadi hal yang tidak memungkinkan. Meski harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, makan malam singkat ini tetap memberikan esensi kehangatan dan kebersamaan seluruh tim MDPI.

MDPI ON THE MAP

WILAYAH KERJA

MDPI memiliki pengalaman mendalam di bidang pengelolaan perikanan, khususnya di wilayah Indonesia timur, dengan implementasi kegiatan di 6 provinsi. Kami bekerja demi menjamin hasil jangka panjang yang nyata dan dapat bertahan dalam kelompok masyarakat yang kami libatkan, melalui beragam pelatihan hingga pemberdayaan *champion* lokal.





MENGGAPAI MIMPI: SERTIFIKASI MSC

Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) untuk perikanan *handline yellowfin tuna* di Indonesia merupakan mimpi yang telah lama diperjuangkan oleh MDPI sejak pertama berdiri di tahun 2013, melalui Fisheries Improvement Project dan implementasi program Fair Trade USA.

Fisheries Improvement Project (FIP) untuk nelayan *tuna handline* skala kecil di bagian timur Indonesia telah aktif dijalankan sejak program Fishing and Living dimulai sebagai bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Anova Food, hingga akhirnya MDPI resmi berdiri di tahun 2013. Salah satu tujuan FIP adalah untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan perikanan berdasarkan 3 prinsip MSC, yakni: (1) keberlanjutan stok ikan; (2) meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan (3) pengelolaan yang efektif. Proses persiapan pengajuan sertifikasi MSC dimulai dengan melakukan pengumpulan data perikanan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Indonesia dalam skala nasional dan regional demi mendukung pengelolaan perikanan tuna, juga untuk memberikan informasi pendukung dalam proses penilaian oleh MSC. Bergerak dari hasil *pre-assessment* standar MSC sejak 2009, evaluasi terus dilakukan untuk menilai setiap perkembangan, termasuk perbaikan program dan evaluasi hasil kerja rutin per 6 bulan yang dilakukan oleh MDPI bersama *stakeholder* perikanan lainnya.

Capaian MDPI dalam membina para nelayan kecil melalui program Fair Trade (FT) di Pulau Buru juga menjadi bagian integral dalam proses pengajuan sertifikasi MSC. Sejak 2013, MDPI mendampingi kelompok nelayan Pulau Buru dalam mencapai dan mempertahankan standar Fair Trade, sebuah sertifikasi internasional yang menerapkan mekanisme perdagangan adil dan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya, tetapi juga mendukung peningkatan sosial di masyarakat dan seluruh rantai pasok. MSC dan FT juga menjadikan ketelusuran (*traceability*) sebagai salah satu syarat penting yang wajib dipenuhi, sehingga sertifikasi FT yang telah dimiliki oleh kelompok nelayan Buru sejak 2014 turut menjadi nilai pendukung dalam proses penilaian MSC. Kemajuan FIP yang terus dikembangkan dan penerapan standar FT di Pulau Buru yang berjalan semakin baik membawa hasil *pre-assessment* yang cukup signifikan di pertengahan tahun 2018.

MDPI juga memiliki Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah berjalan sejak 7 Desember 2018. Salah satu ruang lingkup Arahan Program dalam kesepakatan tersebut adalah Penguatan Akses



Pasar melalui Sertifikasi Produk Perikanan Tuna Indonesia. Arahan Program, didukung oleh hasil *pre-assessment* 2018 yang memuaskan, menjadi landasan kuat untuk mengajukan *Full Assessment* kepada MSC. Pada 25-28 Maret 2019 MDPI turut serta memfasilitasi proses sertifikasi MSC perikanan *yellowfin tuna handline* di Pulau Buru untuk 123 kapal, dengan mitra kerja Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra. SCS Global Services dipilih sebagai Conformity Assessment Bodies (CABs) untuk menilai secara keseluruhan dari aspek perikanan.

Setelah melalui proses yang panjang dan penilaian yang ketat, MDPI turut bangga atas pemberian sertifikat MSC untuk *yellowfin tuna handline* Pulau Buru, dengan Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra serta kelompok nelayan Buru sebagai pemegang sertifikat bersama. Sertifikasi MSC untuk Komite Nelayan Fair Trade Buru dan Maluku merupakan yang pertama untuk perikanan *yellowfin tuna handline* di dunia dan kedua di Indonesia, menjadikan sertifikasi ini sebuah pencapaian besar bagi perikanan Indonesia. Nelayan yang mendapat sertifikasi MSC adalah anggota kelompok nelayan Fair Trade binaan Yayasan MDPI, sehingga produk *yellowfin tuna* yang berasal dari wilayah Buru akan memiliki 2 (dua) label sertifikasi internasional, yaitu Fair Trade dan MSC.

Sebagai salah satu produsen *seafood* terbesar dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan laut dan menghasilkan pasokan hasil laut yang berkelanjutan. Pemberian sertifikasi MSC membuktikan bahwa dengan adanya upaya kolaboratif antara berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, nelayan hingga peneliti, dan instansi terkait lainnya, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.



REINFORCING: DATA COLLECTION, EFFECTIVE MANAGEMENT & TRACEABILITY



Indonesia memiliki banyak kapal nelayan kecil yang tidak dilaporkan, meski jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kapal besar yang saat ini menjadi target pengumpulan data pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendukung terlaksananya perikanan yang transparan dan taat hukum, MDPI giat melakukan pendataan ikan dan pendaftaran kapal kecil.

Seperti tahun sebelumnya, kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan perikanan tuna. Data poin yang dikumpulkan antara lain mencakup total hasil tangkapan, frekuensi panjang-berat, komposisi hasil tangkapan, penggunaan umpan, *Endangered, Threatened, and Protected (ETP) species*, hasil tangkapan sampingan termasuk jenis data yang diperlukan untuk penentuan *Catch Per Unit Effort (CPUE)*. Data yang dikumpulkan di-upload ke dalam database I-Fish, salah satunya untuk mendukung penyusunan dan implementasi *Harvest Strategy Tuna Tropis* di Perairan Kepulauan Indonesia (WPPNRI 713, 714, 715) dan menjadi pendukung proses tercapainya sertifikasi *ecolabel* Marine Stewardship Council (MSC) pada tanggal 12 Mei 2020. Total *port sampling data* di tahun 2020 terhitung sebanyak 3,756 data, dengan berat total 508,853 kg.

Selain pendataan oleh tim MDPI, para nelayan juga didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan pendataan, khususnya dengan menggunakan *logbook* perikanan tangkap. Begitu besar kontribusi nelayan tuna skala kecil untuk perikanan tuna di Indonesia, sehingga informasi hasil tangkapan menjadi sangat penting untuk terus dikumpulkan. Bersama USAID SEA, MDPI turut memfasilitasi proses diseminasi *logbook* perikanan tangkap yang sudah disederhanakan khusus untuk nelayan kecil; nelayan diberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya data *logbook* untuk perikanan berkelanjutan, sekaligus

Khusus di Provinsi NTB, melalui salah satu rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna untuk mengakselerasi perizinan dan meningkatkan perikanan yang legal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok. Program Pelayanan SAMSAT Perizinan Kapal Perikanan yang juga didukung oleh MDPI ini, telah diresmikan oleh Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur pada 18/11/2020.

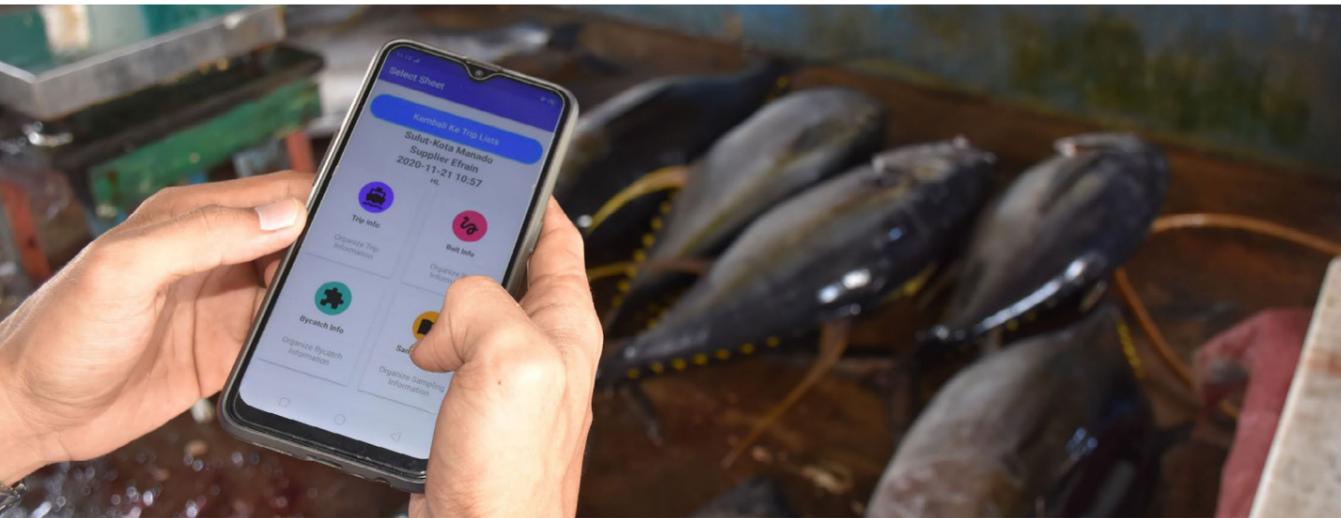


dengan simulasi pengisiannya serta pelatihan identifikasi ikan. *Logbook* perikanan tangkap mulai didiseminasikan kepada komunitas nelayan tuna skala kecil di bagian timur Indonesia pada bulan Maret 2020, bersama para nelayan tuna di Maluku Utara. Selain untuk merekam hasil tangkap, pengisian *logbook* juga menjadi persyaratan penting dalam mempertahankan sertifikasi Fair Trade USA Capture Fisheries dan dapat menjadi pegangan saat melakukan *cross-check* penggunaan bahan bakar atau pembayaran ikan dari *supplier* ke nelayan.

Dalam mendukung pelaksanaan *legal fisheries*, MDPI berkolaborasi dengan *stakeholder* seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Desa dan mitra organisasi lainnya dalam memfasilitasi pendaftaran kapal. Proses pendaftaran dimulai dengan pengukuran kapal sebagai langkah awal pengurusan Pas Kecil, kemudian dilanjutkan ke pengurusan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk kapal kecil ($\leq 5GT$) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal besar ($\geq 7GT$). Jumlah kapal yang difasilitasi oleh MDPI di 6 provinsi untuk mendapat Pas Kecil sebanyak 1193 unit, BPKP 1309 unit dan SIPI 8 unit.

Sehubungan dengan pengelolaan perikanan, disadari bahwa pengelolaan yang dijalankan harus berorientasi padaparticipasimasyarakat (*people oriented*). Oleh karena itu, keterlibatan unsur pemangku kepentingan menjadi suatu keharusan dalam mencapai kesuksesan. Hal ini menjadi motivasi MDPI dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini DKP Provinsi, untuk menginisiasi pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna di Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah kerja MDPI, sebagai wadah untuk mempertemukan pemangku kepentingan perikanan secara rutin di tingkat

kabupaten, provinsi dan nasional. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020, Pertemuan Reguler KPBP Tuna yang dijadwalkan dua kali setahun hanya dapat terlaksana di Provinsi NTB dan Maluku, sedangkan di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur hanya dilakukan masing-masing satu kali pertemuan. Terlepas dari penundaan tersebut, tahun 2020 menjadi tahun diterbitkannya Buku Panduan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Sesuai Standar Perikanan Tangkap Fair Trade di Provinsi Maluku, yang diresmikan pada Pertemuan Reguler KPBP Tuna Provinsi Maluku.



Dewasa ini “ketelusuran” merupakan kata penting dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung penerapan azas ketelusuran produk, dari laut hingga ke piring (*from the sea to the plate*).

Selama hampir 8 tahun, MDPI telah menerapkan teknologi berbasis ketelusuran (*traceability-based technology*), dari pelacak kapal seperti SPOT Trace, TREKFish, dan Pelagic Data System (PDS) untuk mengetahui daerah tangkapan, khususnya untuk memastikan bahwa aktivitas tangkap tidak dilakukan di wilayah dilindungi. Di samping itu, *time-lapse camera* dan kamera Reolink juga digunakan untuk merekam aktivitas nelayan, termasuk melihat hasil tangkapan dan interaksi dengan spesies terancam punah atau dilindungi. Dalam mengumpulkan *port sampling data* telah tersedia versi terbaru 2020 untuk I-Fish App, yang memudahkan sistem pengumpulan data oleh enumerator saat kapal bongkar muatan di pelabuhan dan di tempat pendaratan perikanan tuna lainnya. Di tingkat *supplier*, pencatatan hasil tangkap dilakukan menggunakan aplikasi Trafiz, sedangkan pencatatan di unit pengolahan ikan (UPI) menggunakan TraceTales™. Dengan Trafiz dan TraceTales™, pencatatan dapat dilakukan secara digital (*paperless*).

TraceTales™

Hingga saat ini terdapat 6 UPI di wilayah kerja MDPI yang menggunakan sistem TraceTales™ dan telah menghasilkan produk tuna yang dapat ditelusuri (*traceable*) sebanyak lebih dari 5.500 ton. Dengan skema ketelusuran seperti ini, MDPI mampu turut mendukung upaya pencegahan masuknya *illegal product* ke dalam *legal supply chain* (rantai pasok yang legal).



WORLD FISHERIES DAY & SID 2020

Untuk memperingati Hari Perikanan Dunia, atau World Fisheries Day (WFD), dan Hari Ikan Nasional tahun ini MDPI melakukan serangkaian kegiatan di 10 lokasi kerja yang tersebar di 6 provinsi. Kegiatan berlangsung selama 21 November-1 Desember dengan melibatkan 1.057 peserta dari berbagai pihak mulai dari murid sekolah, mahasiswa, pemuda dan pemerintah setempat, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan, TNI hingga Kepolisian. Tema yang diusung pada peringatan kali ini adalah “Bersih Pantauku, Melimpah Ikanku, Sehat Hidupku”, mengingat saat ini masih banyak yang menjadikan laut sebagai tempat sampah.

Bertepatan dengan momentum WFD, MDPI kembali mengajak komunitas nelayan untuk membersihkan pantai dari sampah dan tahun ini tercatat total sekitar 2,3 ton sampah organik dan non-organik yang terkumpul dan diserahkan kepada Dinas Kebersihan setempat. Sebagai upaya *awareness raising* lainnya, dibuat juga papan edukasi tentang bahaya sampah plastik untuk dipajang di tempat umum, dengan harapan agar masyarakat lebih bijak dan segera mengurangi penggunaan kemasan plastik. Kegiatan WFD juga diramaikan oleh berbagai lomba seperti lomba mewarnai dan pembuatan poster kampanye lingkungan, lomba mendayung sampan, lomba memasak dan makan ikan,

hingga pembagian bibit bakau. Sebagai penutup, seluruh masyarakat memberikan tanda tangan mereka di sebuah spanduk sebagai bentuk pernyataan komitmen bersama untuk tetap menjaga kebersihan laut dan pantai.

MDPI juga mengadakan *Sharing Informasi dan Data (SID)* bersama para nelayan dan *supplier*, sebuah kegiatan rutin yang menjadi wadah bagi nelayan untuk menceritakan dan mengilustrasikan perubahan kondisi perikanan yang mereka alami dalam 20 tahun terakhir, beserta dengan segala penyebabnya. Terlihat bahwa nelayan sangat paham tentang pentingnya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, karena mereka menyadari adanya perubahan drastis yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masih maraknya praktik penangkapan yang merusak. Mereka pun sepakat untuk terus mendukung upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, salah satunya melalui pengisian *logbook* hasil tangkapan dan pendaftaran kapal, juga bersedia terlibat aktif dalam berbagai implementasi teknologi ketelusuran dan pengumpulan data. Di akhir kegiatan, MDPI membagikan laporan aktivitas memancing nelayan yang juga memuat informasi hasil tangkapan mereka selama 1 tahun, yang juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas penangkapan hingga pengelolaan keuangan keluarga mereka.





HARVEST STRATEGY TUNA TROPIS DI WPPNRI 713, 714, 715

Sejak tahun 2017, Indonesia telah melaksanakan rencana aksi pengelolaan perikanan berdasarkan Kerangka Strategi Pemanenan (*Harvest Strategy*) untuk Tuna Madidihang, Tuna Mata Besar dan Cakalang di WPPNRI 713, 714 dan 715. Strategi Pemanenan bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya tuna jenis tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, untuk menjamin keamanan pangan, pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan penyediaan kesempatan kerja.

PROGRAM “OBSERVER”

Untuk memperkuat penyusunan *Harvest Strategy* (HS) dalam meningkatkan kualitas data, MDPI turut mendukung implementasi program Pemantau (*Observer*) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Observer on-board* turut ditempatkan di kapal *handline* tuna ≤ 30 GT di beberapa wilayah kerja MDPI seperti Buru, Seram, Sanana, Bone, Ternate, Morotai, Kupang dan Lombok. Para *Observer* bertugas untuk melakukan pemantauan secara langsung di atas kapal dengan melakukan pencatatan dari aktivitas di laut hingga identifikasi hasil tangkapan. Data yang dikumpulkan *Observer* akan sangat bermanfaat untuk verifikasi lebih mendalam terhadap data dan informasi yang juga dikumpulkan para enumerator, hasil Time Lapse Camera dan teknologi Vessel Tracker. Para *Observer* juga rutin diberikan *refresher training* untuk menjaga konsistensi kualitas data yang dikumpulkan.

TECHNICAL DATA WORKSHOP

Serangkaian lokakarya telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Desember 2020, namun situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu mengakibatkan banyak kegiatan harus diundur. Pre-Technical Data Workshop telah diadakan pada tanggal 10-11 Desember 2020 di Bogor, namun lokakarya bersama para *stakeholder* dan *Technical Data* terpaksa harus ditunda dan dijadwalkan ke awal 2021.

MDPI aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan *Harvest Strategy* Tuna Mata Besar, Tuna Madidihang dan Cakalang di Perairan Kepulauan Indonesia WPPNRI 713, 714, 715. Partisipasi MDPI dilakukan antara lain melalui kontribusi data hasil tangkapan pancing ulur, pengumpulan data rumpon serta kolaborasi pelaksanaan *Stakeholder dan Technical Data Workshop* sejak tahun 2014. »

Saut Tampubolon
Fisheries Policy Advisor MDPI

KONTRIBUSI LAINNYA

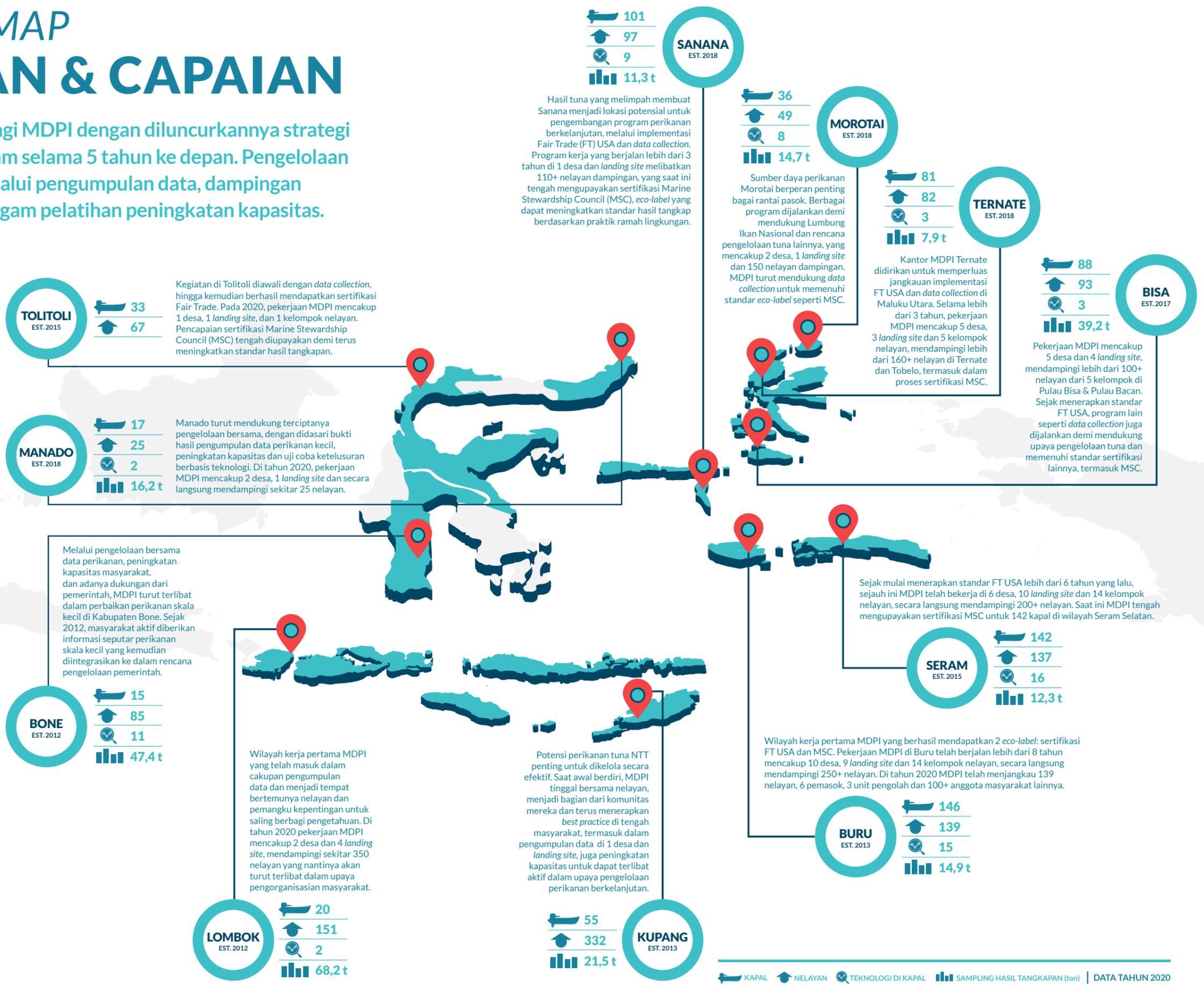
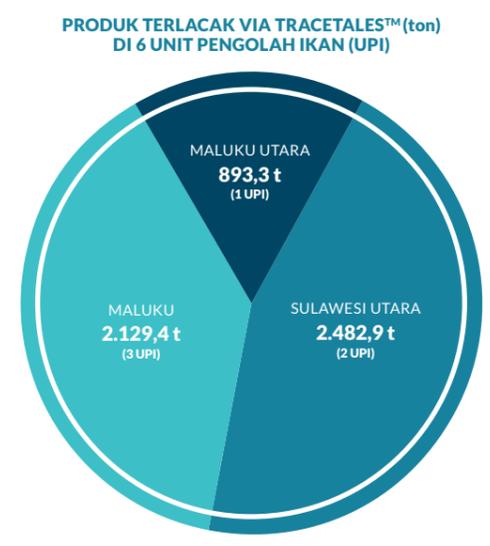
Berdasarkan Kerangka Kerja *Harvest Strategy* yang telah disepakati bersama, sejauh ini MDPI telah memberikan kontribusi sebagai berikut:

- ✓ Melakukan Inventarisasi data rumpon yang dipergunakan oleh nelayan binaan MDPI dan semua data telah di-*upload* kedalam Diva-tuna, yaitu sebanyak 109 data rumpon aktif.
- ✓ Mengusulkan kategori alat tangkap ikan tuna *handline* (tHL) dan telah diadopsi oleh DJPT dan Pusrisan untuk dipergunakan dalam *HS Modeling*.
- ✓ Menyampaikan laporan Karakteristik Nelayan Kecil Pancing Ulur Tuna kepada KKP.
- ✓ Bekerjasama dengan AP2HI dan IPNLF, menyusun Protokol pengumpulan data oleh *observer on-board* untuk tHL dan telah diadopsi oleh DJPT/Pusrisan.
- ✓ Menyampaikan *White Paper* tentang penguatan kebijakan pengelolaan Rumpon kepada DJPT.
- ✓ Memberikan kontribusi dalam Pertemuan Pre-Technical *Harvest Strategy* Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 & 715 yang dilaksanakan oleh Pusrisan.
- ✓ Data I-fish MDPI dari WPP 713, 714, dan 715 (IAW) tahun 2019 telah diadopsi dan disepakati oleh KKP untuk menjadi acuan komposisi tangkap tuna *handline* pada IAW, yang langsung di adopsi oleh SATU DATA-PUSDATIN saat Workshop Indonesia Tuna Fisheries Annual Catch Estimates 11 pada 15-16 Juli 2020.
- ✓ Menyusun Protokol Pengumpulan Data tuna *handline* dan telah diadopsi oleh DJPT/Pusrisan.
- ✓ Berkontribusi dalam pelaksanaan *training Observer* Perikanan tangkap dari KKP yaitu sebanyak 20 orang *Observer* baru pada 13-18 Desember 2020.

MDPI ON THE MAP

JANGKAUAN & CAPAIAN

Tahun 2020 menjadi bab baru bagi MDPI dengan diluncurkannya strategi baru untuk implementasi program selama 5 tahun ke depan. Pengelolaan perikanan terus diupayakan melalui pengumpulan data, dampingan masyarakat perikanan, dan beragam pelatihan peningkatan kapasitas.



KAPAL
 NELAYAN
 TEKNOLOGI DI KAPAL
 SAMPLING HASIL TANGKAPAN (ton) | DATA TAHUN 2020



MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PERIKANAN

Seperti yang tergambarkan melalui nama MDPI, kami percaya bahwa tanpa adanya keterlibatan, perkembangan dan kepedulian dari masyarakat, maka upaya peningkatan pengelolaan perikanan berkelanjutan tidak akan berhasil. MDPI telah bertahun-tahun menjalankan program sertifikasi Fair Trade USA sebagai salah satu wadah untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan sekaligus mendukung pengembangan nelayan dan seluruh rantai pasok. Hingga kini, MDPI masih terus meningkatkan kompetensi dalam aspek pengorganisasian masyarakat perikanan.

Untuk mematangkan kesiapan implementasi program FCO di tahun 2021, MDPI menggelar pelatihan pengorganisasian masyarakat untuk jajaran staf MDPI, baik yang bertugas di lapangan maupun di kantor Bali. Di penghujung tahun 2020, tim MDPI berkumpul di Bali selama 5 hari untuk menerima materi seputar analisis sosial, teknik fasilitasi, identifikasi isu, pengorganisasian masyarakat, media populer dan sekilas tentang fotografi dasar. Bersama

Sebagai bagian dari strategi baru yang mulai dijalankan tahun 2020, MDPI merumuskan kembali beberapa pendekatan sehubungan dengan pembangunan berbasis masyarakat, salah satunya pengorganisasian masyarakat melalui program Fisheries Community Organization (FCO).

Yayasan Wisnu, tim MDPI juga berkunjung ke beberapa desa di Bali yang menjadi model ekowisata, untuk mempelajari kiat pengorganisasian masyarakat yang dilakukan di sana. MDPI yang kesehariannya bekerja bersama komunitas nelayan dinilai sangat memerlukan peningkatan kapasitas seperti ini. Ilmu yang didapat melalui pelatihan ini dapat mempertajam kemampuan staf dalam mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan dinamika di lapangan, yang nantinya akan berujung pada perubahan perilaku di dalam sebuah komunitas ke arah yang lebih baik. Ke depannya, MDPI akan menjadikan pengorganisasian masyarakat sebagai salah satu fokus utama dalam mendukung perikanan berkelanjutan. Kami akan terus mendukung organisasi, visi/misi dan objektif serta kegiatan lainnya terkait pengembangan kelompok dan koperasi nelayan. Saat ini, MDPI mendampingi lebih dari 30 kelompok nelayan dan tengah memperluas jangkauan pekerjaan dalam bentuk pengorganisasian masyarakat di setiap provinsi yang menjadi wilayah kerja MDPI.

PROGRAM "CHAMPION"

Sejak September 2020, MDPI mulai mengidentifikasi program maupun tokoh perubahan, atau disebut juga *champion*, pada setiap area kerja, demi mengembangkan program yang lebih efektif dan menyeluruh agar bisa dirasakan manfaatnya pada setiap elemen masyarakat dengan tetap berpegang pada perikanan yang berkelanjutan. Pengembangan model *champion* di wilayah kerja MDPI sesuai dengan rencana strategis dalam 2 tahun ke depan, sehubungan dengan pengembangan dan penguatan masyarakat untuk turut aktif dalam pengelolaan perikanan, khususnya melalui wadah koperasi atau kelompok, juga pengembangan kapasitas *champion* melalui pelatihan dan penyebaran informasi. Istilah *champion* yang berarti "juara" memiliki makna dalam pengorganisasian di masyarakat sebagai perorangan atau komunitas yang mengambil peran dalam perubahan suatu isu atau program, dengan tujuan meningkatkan pemahaman banyak orang menjadi sebuah gerakan untuk kehidupan yang lebih baik. Besar harapan dengan dijalankannya program *champion*, dan lahirnya seorang *champion*, di satu desa akan berdampak positif pada lingkungan maupun sosial kemasyarakatan di sekitarnya.



Kami tidak dapat mendampingi mereka selamanya dan kami juga tidak akan mampu bekerja sendiri. Para *champion*, para pelopor desa, merupakan tulang punggung dan ujung tombak dalam mewujudkan praktik perikanan yang lebih baik demi menopang kehidupan keluarga nelayan, saat ini dan di masa depan. »

Nilam Ratna
Manajer Program FCO

ASURANSI NELAYAN

Mengingat banyaknya tantangan pekerjaan yang dialami para nelayan saat melaut, pemerintah Indonesia mengadakan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bersama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang berlaku selama satu tahun pertama. Berkat adanya kesadaran nelayan akan pentingnya asuransi, pembayaran premi asuransi di tahun selanjutnya dilanjutkan secara mandiri oleh para nelayan, dan per Desember 2020 sebanyak 193 nelayan tuna di wilayah Maluku Utara (Sanana) dan Maluku (Buru dan Seram) telah memiliki asuransi mandiri, yang juga berfungsi sebagai kartu identitas nelayan. Proses yang dijalankan hingga kartu terdistribusi membutuhkan waktu 1,5 bulan dan dengan adanya kerjasama yang baik antara nelayan, MDPI dan pihak Jasindo, proses pengurusan asuransi nelayan dapat berjalan dengan lancar.



PELATIHAN "SAFETY AT SEA"

Lokasi tangkap yang melebihi 12 *nautical mill*, durasi perjalanan penangkapan ikan hingga 20 hari hingga gelombang dan badai besar seringkali menjadi ancaman bagi nelayan. Dalam upaya meminimalisir angka kecelakaan di laut, MDPI bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengadakan pelatihan *Safety at Sea* (SAS) dengan harapan agar para nelayan dapat lebih memahami dasar-dasar informasi cuaca maritim dan keamanan di laut, mendapatkan teori dan praktik tentang pertolongan pertama, navigasi dan teknik *survival* serta tata cara mengajukan pertolongan dalam kondisi darurat. Rangkaian pelatihan SAS dimulai pada bulan Februari 2020 bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, BASARNAS dan BMKG untuk para nelayan skala kecil di Lombok Timur. Selanjutnya pelatihan SAS diadakan di Tolitoli, Sulawesi Tengah bersama TNI Angkatan Laut Tolitoli, dengan sasaran seluruh anggota kelompok nelayan Fair Trade di Desa Salumpaga. Selama tahun 2020 MDPI telah memfasilitasi sejumlah 7 pelatihan SAS, termasuk di wilayah Buru dan Seram di Provinsi Maluku, dan wilayah Sanana, Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara.

KARTU 'KUSUKA'

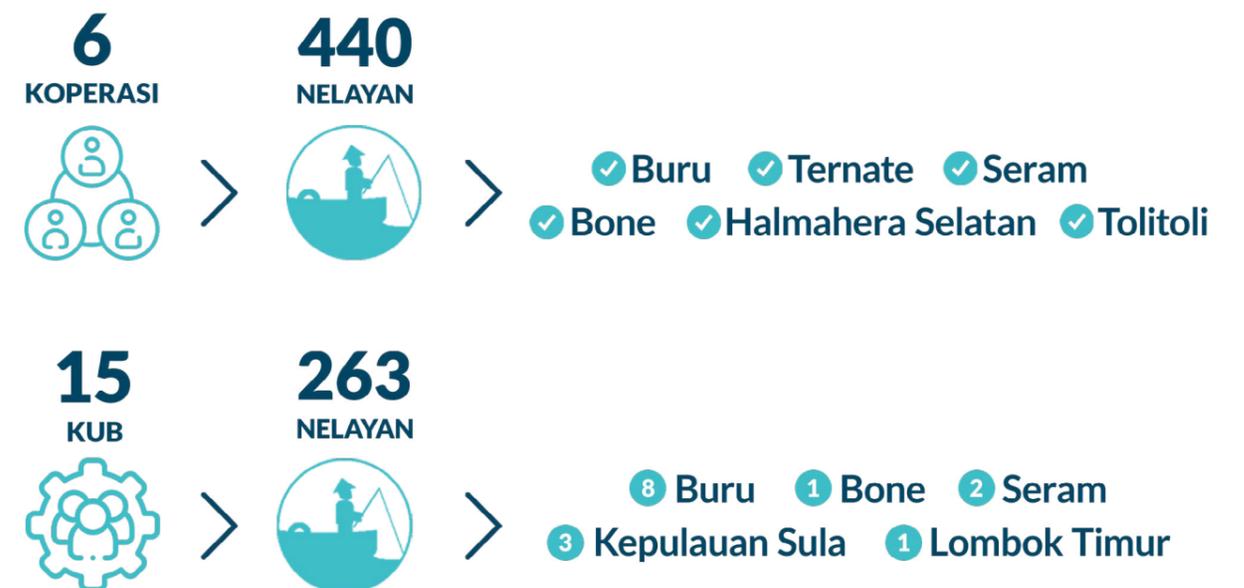
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, atau 'KUSUKA', adalah kartu identitas resmi yang digunakan oleh KKP untuk mengidentifikasi para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dalam rangka upaya perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan mewujudkan efektivitas program pemerintah dengan tepat sasaran. Nelayan adalah pelaku utama dalam usaha perikanan, namun banyak nelayan di wilayah dampingan MDPI yang tidak mendapat informasi maupun mendapat kemudahan dalam pengurusan KUSUKA karena lokasi mereka yang cukup jauh dari kota. MDPI mendampingi lebih dari 700 nelayan dalam pengurusan Kartu KUSUKA di Lombok, Kupang, Buru, Seram, Ternate, Bisa, Morotai, Sanana dan Tolitoli. Saat ini sebanyak lebih dari 350 nelayan yang telah terdaftar E-KUSUKA.



PEMBENTUKAN KOPERASI NELAYAN & KELOMPOK USAHA BERSAMA

MDPI mendukung kemajuan komunitas nelayan tuna, juga pelaku yang bekerja dalam industri perikanan, melalui pembangunan ekonomi dan beragam program peningkatan sosial. Salah satu target yang ingin dicapai oleh MDPI dalam 5 tahun ke depan adalah terbentuknya 30 koperasi nelayan. Demi membantu para nelayan keluar dari kerumitan ekonomi yang mejadi dampak COVID-19, MDPI terdorong untuk mengakselerasi pendirian 6 koperasi di beberapa wilayah dampingan, di antaranya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan; Kabupaten Maluku Tengah, Maluku; Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah; Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera, Maluku Utara. Kehadiran koperasi nelayan yang sudah terbentuk merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki kehidupan nelayan melalui implementasi usaha yang meliputi jual-beli ikan, bahan bakar minyak, usaha dagang alat tangkap dan sembako, juga usaha simpan-pinjam dan usaha pendukung lainnya.

Pada tahun 2020 total nelayan dan istri nelayan dampingan MDPI yang telah tergabung dalam koperasi terhitung sebanyak 440 orang. Sebelumnya MDPI telah memfasilitasi pendirian 1 koperasi nelayan di bulan Januari 2020, bertempat di Desa Wamlana, Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan jumlah anggota 169 orang yang terdiri dari nelayan bersertifikasi Fair Trade (FT) & Marine Stewardship Council (MSC) serta para istri nelayan. Koperasi ini dibentuk sebagai persyaratan sertifikasi FT tahun ke 6, namun tetap memiliki dasar alasan yang sama dengan dibentuknya 5 koperasi yang lain, yaitu untuk kemandirian komunitas nelayan secara ekonomi dan organisasi. Dengan disahkannya koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) diharapkan akses terhadap modal usaha maupun akses terhadap pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota maupun lembaga semakin terbuka dan mudah dijangkau.





BERADAPTASI DI TENGAH PANDEMI

Merespon pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) selama tahun 2020, MDPI menjadi salah satu dari sekian banyak organisasi yang harus beradaptasi dengan gesit dan meluncurkan berbagai aksi darurat demi membantu komunitas nelayan di seluruh wilayah kerja MDPI.

DANA PREMIUM DARURAT FAIR TRADE

Harga beli ikan tuna yang menurun drastis, hingga berkurangnya permintaan tuna dari Jepang dan Amerika di awal masa pandemi akibat banyaknya restoran yang tutup telah berdampak pada seluruh rantai ekspor tuna. Dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, banyak perusahaan pengolah ikan yang juga terpaksa tutup sementara waktu karena berbagai himbauan karantina. Bagi nelayan tuna Indonesia yang hasil tangkapannya diekspor secara global, mereka harus menerima harga jual yang sudah mendekati harga pasar lokal. Berbagai faktor ini menyebabkan para nelayan kesulitan mendapatkan penghasilan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan primer. Sebagai respon cepat terhadap pandemi COVID-19, Fair Trade (FT) USA mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan penggunaan Dana Premium FT untuk Program Darurat selama pandemi. Dana Premium Kelompok biasanya dialokasikan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan oleh kelompok, seperti pembentukan koperasi dan berbagai pelatihan untuk nelayan. Total Dana Premium sebesar Rp 257.550.000 tahun ini dialokasikan untuk program tanggap darurat, dengan kisaran Rp 5.000.000-Rp 52.000.000 per kelompok untuk pengadaan berbagai kebutuhan seperti beras, gula, minyak goreng dan kebutuhan lainnya, serta masker dan disinfektan. Hingga akhir 2020, kebutuhan telah didistribusikan kepada total 432 keluarga di desa kelompok, termasuk untuk janda dan anak yatim. Dengan segala ketidakpastian berkepanjangan yang menyelimuti dunia dalam masa pandemi ini, MDPI terus merespon kebutuhan kelompok secara adaptif dan memberikan konfirmasi mengenai keberlangsungan Program Tanggap Darurat dan ketersediaan dana.



Kelompok/FA yang telah menyepakati pengadaan Program Tanggap Darurat:

TOLITOLI
FA Lumba-Lumba

SERAM
FA Tuna Yapana
FA Tuna Tunas Beringin

BISA
FA Tuna Jaya
FA Usaha Bersama
FA Beringin Jaya
FA Samudera Mandioli
FA Usaha Laut

Kelompok/FA yang telah mengajukan pengadaan Program Tanggap Darurat:

BURU
FA Wamrugut
FA Waepalabung
FA Latamiha
FA Setia Selalu
FA Labuang Barat
FA Tagalisa Tuna

SANANA
FA Tuna Bajo
FA Sang Jaya
FA Berkah Tuna

PEMBAGIAN MASKER

Demi mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, sepanjang Mei 2020 MDPI turut melakukan pembagian masker gratis. Lebih dari 2,000 masker kain dibagikan kepada nelayan tuna dan keluarga, juga *supplier* dan karyawan gudang di wilayah kerja MDPI, dengan kisaran antara 60-300 masker per wilayah. Para nelayan antusias dan bersyukur bisa mendapatkan masker gratis, mengingat mahal dan sulitnya mendapatkan masker di beberapa daerah pada saat itu.



RAPID ASSESSMENT

Laju penyebaran COVID-19 yang pesat di Indonesia, ditambah dengan serangkaian pembatasan sosial oleh pemerintah, turut berimbas pada aktivitas nelayan. Harga ikan turun drastis, proses produksi dan rantai distribusi terputus; hal ini mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk menjual hasil tangkapan. Ketika pandemi terindikasi berdampak pada tatanan sosial-ekonomi, MDPI menjalankan *Rapid Assessment* Dampak COVID-19 Terhadap Nelayan Tuna *Handline* di lokasi kerja MDPI di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). *Assessment* yang dilaksanakan pada periode 20 Maret hingga 5 Mei 2020 menunjukkan bahwa nelayan yang paling berat terdampak adalah para nelayan *one-day fishing* di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, kemudian para nelayan *multi-day fishing* di NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Penurunan harga tuna berkisar 25%-37% (*one-day fishing*) dan 17%-23% (*multi-day fishing*). Biaya operasional penangkapan tidak mengalami penurunan karena harga bahan bakar minyak tidak mengalami penurunan. Namun, dikhawatirkan bila penurunan harga ikan di tingkat nelayan terus berlangsung, maka usaha penangkapan ikan akan menjadi usaha yang tidak lagi layak (*not-feasible*).



Di awal September 2020, proses audit Fair Trade (FT) dijalankan bersama seluruh kelompok nelayan tuna dampingan MDPI, *supplier* dan perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok tuna bersertifikat FT. Seperti banyak kegiatan lainnya tahun ini, proses audit FT yang berlangsung selama 2-11 September 2020 turut menjadi yang pertama kalinya dilakukan secara virtual.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari keseluruhan implementasi program dan penggunaan Dana Premium, FT USA menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi para pemegang sertifikat dan pihak terkait lainnya, seperti menjalankan proses kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi segala kebutuhan yang dapat dibantu oleh Dana Premium, yang juga dapat dipertanggungjawabkan, demi mempertahankan sertifikasi FT yang dipegang.

Selama total 8 hari yang mencakup rapat pembukaan virtual, wawancara mendalam dan akhirnya rapat penutupan, tim MDPI mendampingi sebanyak total 8 kelompok nelayan, 7 *supplier* dan 3 perusahaan pengolah produk tuna yang tersebar di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Saat itu penerbangan dan pertemuan tatap muka sangat dibatasi dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, sehingga periode audit kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim MDPI yang mengkoordinir proses audit secara daring. Lokasi mayoritas kelompok nelayan yang sulit dijangkau oleh jaringan komunikasi menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan audit virtual, khususnya saat cuaca kurang bersahabat, ditambah dengan faktor jarak antar-pulau yang harus ditempuh oleh tim MDPI untuk dapat memfasilitasi tiap kelompok dengan seperangkat elektronik, demi mendukung kelancaran komunikasi melalui *video call* dengan para auditor di Bali dan Jawa Tengah.

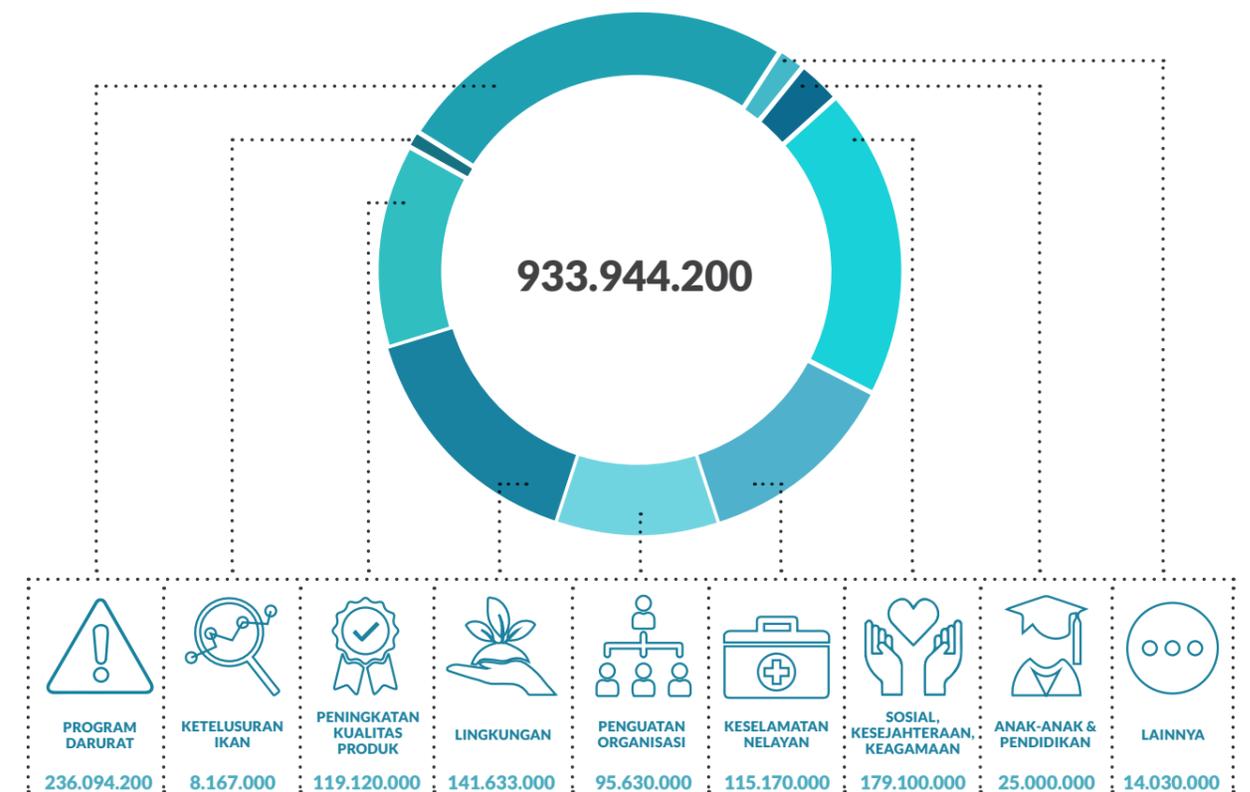
Dalam proses audit virtual, Kelompok Nelayan/Komite diwawancara secara daring oleh auditor sebelum menjalankan wawancara individu dengan sejumlah anggota nelayan dari masing-masing kelompok yang dipilih secara acak oleh auditor. Melalui *video call*, audit kondisi *landing site* dan kapal dilakukan dengan cara memperlihatkan kondisi masing-masing *landing site* dan armada kapal nelayan kepada auditor, sedangkan para *supplier* diwawancara secara individu dan diminta untuk memperlihatkan kondisi *mini-plant* mereka secara langsung saat *video call*. Wawancara daring



dengan perusahaan atau unit pengolahan ikan (UPI) diwakili oleh para penanggung jawab manajerial, *Human Resource Department* (HRD), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan bagian produksi, tidak ketinggalan juga memperlihatkan kondisi pabrik secara menyeluruh.



PENYERAPAN DANA PREMIUM FAIR TRADE 2020 (DALAM IDR)





PELATIHAN APLIKASI TRAFIZ

Sebagai salah satu upaya peningkatan pencatatan keuangan untuk pengembangan ekonomi, MDPI mengadakan pelatihan aplikasi Trafiz, sebuah sistem pencatatan elektronik berbasis Android yang diinisiasi oleh MDPI dengan dukungan USAID OCEANS, kepada para pengusaha perikanan perempuan/tibo-tibo di 3 lokasi di Sulawesi Utara: Manado, Bitung dan Sangihe. Harapannya, pelatihan ini dapat memberikan wawasan dan kebiasaan baru bagi para tibo-tibo untuk selalu mencatat hasil tangkapan, guna mendukung penguatan ekonomi yang lebih bijak dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Para petibo pada umumnya mencatat transaksi bisnis mereka secara manual menggunakan buku, namun ke depannya akan didampingi untuk menuju proses digitalisasi dengan menggunakan aplikasi Trafiz di perangkat Android mereka. Dengan Trafiz, tibo-tibo cukup memasukkan data sesuai dengan format yang telah dirancang di aplikasi, kemudian aplikasi akan menghitung untung/rugi secara otomatis. Input data jenis dan berat ikan serta area tangkap diperlukan untuk mendukung sistem ketelusuran (*traceability*), sehingga kita dapat mengetahui asal-usul ikan yang ditangkap dan jumlah potensi sumber daya di masing-masing lokasi. Sebagai laporan akhir, mereka dapat mengunduh laporan keuangan secara mingguan, bulanan dan tahunan sebagai bukti penjualan yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

PENINGKATAN KAPASITAS 4.0

Demi melanjutkan program kerja setelah beberapa bulan terhenti akibat diterapkannya pembatasan sosial, tim INVEST kemudian merancang sebuah format pelatihan virtual sebagai salah satu upaya MDPI untuk kembali melanjutkan serangkaian kegiatan di masa *new normal* yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Sejak awal 2020, MDPI melalui INVEST Project telah melakukan serangkaian pelatihan untuk para penggerak perikanan di Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya para perempuan penjual ikan (yang dikenal juga dengan sebutan "tibo-tibo" dalam bahasa lokal) di Manado, Bitung dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, tim MDPI di kantor Bali bergabung secara daring bersama tim lapangan dan para peserta yang terkumpul di Aula Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung untuk "Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Masyarakat Perikanan Sulawesi Utara" yang turut dihadiri juga oleh Bapak Tri Aris Wibowo selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pelatihan yang telah diadakan sebelumnya di Manado, Bitung dan Sangihe mengenai

penggunaan aplikasi keuangan dan pemberdayaan masyarakat perikanan. Pelatihan kali ini membahas lebih rinci mengenai peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan perikanan dan keuangan untuk keberlanjutan ekonomi perikanan, dengan menggunakan metode pelatihan yang mendorong keterlibatan aktif para peserta.

Sehubungan dengan masih berlanjutnya pandemi COVID-19, kegiatan pelatihan di lapangan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan setempat. Oleh karena adanya pembatasan jumlah peserta, maka pelatihan dibagi menjadi 2 gelombang: target peserta 55 orang dijadikan 2 kelas menjadi 25 sampai 30 orang perkelas dan mewajibkan peserta untuk menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki ruang pelatihan, dan selalu menjaga jarak selama pelatihan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Perempuan memegang peranan penting dalam rantai perikanan, salah satunya dalam penjualan hasil tangkapan hingga sampai ke tangan konsumen. Sehubungan dengan hal ini, MDPI mengadakan pelatihan kedua dengan tajuk "Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Masyarakat Perikanan" yang berfokus pada pembahasan mengenai gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan serta fungsi dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Para suami dan rekan kerja laki-laki turut diundang untuk mengikuti pelatihan di hari yang berbeda, demi menjaga privasi dan kenyamanan para perempuan yang ingin menyampaikan pendapat terkait isu gender ataupun kekerasan berbasis gender. Di akhir pelatihan para peserta laki-laki berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para petibo, di antaranya dengan menciptakan lingkungan kerja petibo yang aman dan responsif gender serta mendorong peran perempuan petibo dalam kegiatan pengelolaan perikanan berkelanjutan, sehingga nantinya mereka dapat memberi masukan di pertemuan tingkat daerah maupun provinsi.

LSM Swara Parangpuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Manado dihadirkan sebagai narasumber ahli. Pelatihan di Tahuna, Kabupaten Sangihe turut dihadiri oleh para pemilik kapal, nelayan dan DPPPA Kabupaten Kepulauan Sangihe.



PENGGERAK EKOSISTEM PERIKANAN

MDPI tidak hanya bekerja untuk memperbaiki pengelolaan perikanan, tetapi juga memastikan bahwa komunitas nelayan dapat terus berkembang. Dalam mengupayakan hal tersebut, kami turut membangun kemitraan dan, pentingnya lagi, kepemimpinan.



TONI MARTAWIDJAYA

Toni Martawidjaya telah mendukung program MDPI sejak tahun 2013 saat Maluku mulai dikembangkan sebagai salah satu wilayah kerja MDPI, khususnya dalam implementasi program Fair Trade (FT) di Desa Assilulu, Ambon. Saat Pak Toni pindah ke Buru di awal 2014 sebagai *supplier* dari rantai pasok Harta Samudra, beliau terlibat aktif dalam pembentukan kelompok nelayan FT dan komite FT Buru bersama MDPI, dan memotivasi para *supplier* lain dalam rantai pasok tersebut untuk turut membentuk kelompok nelayan FT. Dalam kurun waktu setahun, terbentuklah 9 kelompok FT yang tersebar di 6 desa di Buru Utara. Di tahun yang sama, beliau membantu memperkenalkan FT di wilayah Seram Selatan, hingga di tahun 2015 terbentuk 5 kelompok nelayan FT Seram Selatan. Saat Pak Toni pindah

ke Desa Bajo, Sanana, Kepulauan Sula, beliau mengajak MDPI untuk membentuk kelompok FT di sana. Usahanya yang terus berlanjut, terus membuahkan hasil pula, sehingga pada Oktober 2018 MDPI resmi masuk di Sanana dengan membentuk 3 kelompok di Desa Bajo dan pada tahun 2019 Komite FT Sanana berhasil mencapai total Dana Premium hingga Rp 1M. Dukungannya untuk perikanan berkelanjutan tidak berhenti di situ; kesediaannya untuk terus konsisten mendukung seluruh program MDPI di Sanana, termasuk pendataan ikan, memungkinkan tim MDPI untuk terus memperoleh data hasil tangkap, baik melalui nelayan binaannya maupun dari catatan pembelannya.

Imran Muhare, seorang nelayan tuna Fair Trade (FT) di Kepulauan Sula, menjadi salah satu nelayan yang memiliki peran penting dalam membangun kelompok nelayan di Sanana. Pak Imran menjadi bagian dari pengurus sekaligus enumerator (pencatat hasil tangkapan nelayan) dari Kelompok Tuna Bajo. Kontribusi beliau begitu besar dalam pengembangan dan pelaksanaan beragam kegiatan kelompok, yang turut didorong oleh kepeduliannya bagi kesejahteraan nelayan dan keberhasilan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Meskipun bekerja sebagai nelayan tuna, yang juga tergabung dalam satuan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula, kemampuan beliau dalam pengaturan waktu dan keinginannya untuk terus belajar menjadi kunci keberhasilan beliau menjalankan tugasnya. Kegigihan dan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi juga memudahkan beliau dalam memahami ragam standar FT yang



IMRAN MUHARE

terhitung rumit, menjadi peka terhadap kondisi kelompok dan selalu sigap dalam menyelesaikan dokumen kelompok.



HASBULLAH

Supplier tuna asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini memulai usaha perikanan pada tahun 2015. Hasbullah pertama kali mengikuti kegiatan MDPI saat pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Bone pada tahun 2018. Kehadiran Hasbullah di kegiatan KPBP kemudian memunculkan ketertarikannya untuk berkolaborasi dengan MDPI dan menyarankan MDPI untuk melakukan pendataan di pendaratan ikan miliknya. Beliau juga turut memberikan akses untuk mendapatkan informasi *monthly unloading* dan semua informasi lainnya yang berasal dari tempat beliau. Setelah beberapa kali aktif terlibat dalam pertemuan KPBP Sulawesi Selatan, Hasbullah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan KPBP Regional di

Jakarta, mewakili *supplier* Sulawesi Selatan, bersama beberapa nelayan yang juga berasal dari Bone. “Banyak ilmu yang bisa dipetik tentang pengumpulan data, yang ternyata sangat penting bagi pengelolaan perikanan,” tuturnya. Sejak itu, beliau justru merasa risih jika ikan hasil tangkapan nelayannya tidak didata. Menyadari juga pentingnya kemandirian nelayan secara organisasi dan finansial, pemasok tuna Bone ini turut mendorong pembentukan Kelompok Nelayan Bone di tahun 2019 bersama Penyuluh Perikanan dan MDPI, serta terus aktif memberikan masukan dalam proses pengembangan kelompok tersebut yang juga ditargetkan dapat menjadi Koperasi Nelayan di tahun 2021.



PT NUTRINDO

PT Nutrindo Fresfood International, berlokasi di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), merupakan salah satu Unit Pengolah Ikan (UPI) yang saat ini tengah mengimplementasikan TraceTales™ untuk pencatatan data pengolahan ikan. Sistem yang dikembangkan oleh MDPI ini mulai diperkenalkan di Sulut pada tahun 2018 di bawah USAID OCEANS, untuk membantu UPI berpindah dari pencatatan manual (*paper-based*) ke digital. Sebagai perusahaan yang telah menerapkan standar *British Retail Consortium* (BRC) dalam pengolahan produknya, Nutrindo telah memiliki rantai pasok mulai dari kapal, *supplier*, UPI hingga ke konsumen, yang diwajibkan memiliki sistem pencatatan data yang lengkap, dengan didukung oleh staf administrasi pada setiap tahapan proses produksi.

Penggunaan sistem ketelusuran dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan secara umum dan Nutrindo menyambut baik upaya untuk melakukan transisi menuju pencatatan digital dengan menggunakan TraceTales™ yang juga mempercepat proses rekapitulasi data dan membantu meminimalisir risiko kesalahan pencatatan. Serangkaian proses telah dilalui MDPI hingga tahun 2020, mulai dari tahapan observasi/*scoping* proses pengolahan ikan, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian dan implementasi TraceTales™. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, proses pelatihan sistem bagi beberapa perwakilan perusahaan harus dilaksanakan secara *virtual*, sebelum memasuki fase uji coba selama 3 bulan. Pada Juli 2020 aplikasi TraceTales™ mulai digunakan oleh Nutrindo secara mandiri untuk mencatat seluruh proses penerimaan, pengolahan hingga pengiriman produk. Serah terima produk *software* TraceTales™ dari MDPI ke Nutrindo secara resmi dilakukan pada September 2020, yang sekaligus menjadi akhir dari periode *technical support* MDPI ke Nutrindo dan selanjutnya beralih ke PT Sahabat Laut Lestari (SLL) sebagai awal dari berlakunya *maintenance contract* antara Nutrindo dan PT SLL.



PT SAHABAT LAUT LESTARI

Industri perikanan Indonesia dan dunia masih dihadapkan dengan tantangan *fish laundering*, istilah untuk ikan yang ditangkap secara ilegal namun diselundupkan ke dalam rantai distribusi yang legal. PT Sahabat Laut Lestari hadir untuk menawarkan serangkaian solusi dalam menghadapi masalah ini, dari tahap penangkapan ikan hingga distribusi produk ke konsumen.

Setelah berdiri pada bulan Oktober 2019, PT Sahabat Laut Lestari (SLL) resmi mulai menjalankan kegiatan operasional dan bisnisnya di tahun 2020. Salah satu capaian PT SLL saat tahap awal menjalankan kegiatan operasional adalah mengembangkan struktur harga untuk implementasi TraceTales™, sistem pencatatan digital yang awal mulanya dikembangkan menggunakan dana bantuan dari donor melalui MDPI, dan saat ini telah menjadi produk utama dari PT Sahabat Laut Lestari. Setelah memiliki struktur harga, PT SLL kemudian fokus dalam melakukan evaluasi dan sosialisasi kepada beberapa perusahaan yang selama ini menjadi mitra MDPI dalam pengembangan dan implementasi TraceTales™ di unit

pengolahan ikan. Terdapat tiga perusahaan pengolah, yaitu Harta Samudra, Aneka Sumber Tata Bahari dan Blue Ocean Grace International yang selama ini menjadi mitra MDPI dalam mengembangkan TraceTales™. Dalam proses ini, ketiga perusahaan tersebut beralih dari mitra MDPI menjadi klien PT Sahabat Laut Lestari dan mulai menggunakan TraceTales™ sebagai produk berbayar.

Selain itu, capaian penting PT SLL di tahun 2020 adalah pembentukan visi dan misi perusahaan dengan analisa bisnis tahap awal, yang tertuang dalam *company profile* resmi beserta materi komunikasi yang lengkap, juga dikembangkannya logo perusahaan, *website* dan akun

media sosial PT Sahabat Laut Lestari sebagai beberapa bentuk media komunikasi dan informasi perusahaan.

Meski didirikan bersandingan dengan MDPI, namun sebagai sebuah badan usaha PT Sahabat Laut Lestari kini terpisah secara administrasi dari MDPI, baik dari sisi administrasi keuangan maupun tenaga kerja. Terkait administrasi keuangan, di tahun 2020 PT SLL telah melakukan audit laporan keuangan terpisah dan akan menerbitkan laporan tahunan khusus untuk PT SLL.

scope of business

- ✔ Traceability Information Technology
- ✔ Fisheries Certification
- ✔ Fisheries Improvement Program

kenapa kami

- ✔ Pengalaman 7 tahun dalam ruang lingkup FIM dengan komitmen dan *teamwork* yang baik
- ✔ SDM dan karya mumpuni yang mampu membuat produk *traceability* yang mandiri
- ✔ Pengalaman dengan perusahaan yang mengutamakan *traceability*
- ✔ Pengalaman pembinaan nelayan kecil hingga ke wilayah terpencil
- ✔ Memiliki pengetahuan terkait metode dan standar Fisheries Implementation di Indonesia



PT Sahabat Laut Lestari

Jl. Bypass Ngurah Rai
Ruko Istana Regency Blok S-7 Pedungan
Denpasar Selatan, Denpasar, Bali

M: 0811 3820 5400

W: www.sahabatlautlestari.com

E: info@sahabatlautlestari.com

MEET THE TEAM



Bang Hadi, sebagaimana ia kerap disapa oleh para kerabat di MDPI, adalah salah satu staf senior yang saat ini bekerja di *site* MDPI Lombok. Hadi pertama kali bergabung dengan MDPI saat implementasi *pilot project* sehubungan dengan pengumpulan data perikanan tuna *handline* di Lombok pada tahun 2012. Selain mengerjakan kegiatan pendataan, ia juga aktif melakukan penguatan komunitas nelayan, termasuk untuk anak-anak nelayan di Lombok, dan pengalamannya dalam melakukan pendekatan kepada nelayan dan *supplier* tuna menjadi faktor penting dalam menjalankan program pendataan dengan baik. Ketertarikan Hadi untuk bekerja di program perikanan didasari keinginannya untuk menemukan ilmu baru yang begitu bermanfaat dan dapat diterapkan di tengah masyarakat nelayan tempat ia berasal.

Perempuan asal Ambon dengan latar pendidikan Bahasa Inggris ini telah bekerja di MDPI selama 2 tahun, diawali sebagai Asisten Fair Trade (FT) Pulau Buru, kemudian menjadi Supervisor FT Maluku Utara, hingga tahun 2020 dipercaya menjadi *Site Leader* Maluku untuk mengkoordinir seluruh program kerja MDPI di wilayah Maluku. Sri merupakan sosok yang cepat beradaptasi, senang mempelajari hal baru, dan memahami cara menempatkan diri agar mudah diterima oleh nelayan maupun masyarakat tempatnya ditugaskan; hal yang sangat membantu dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan. Sri senang berbagi pengetahuan dengan nelayan, masyarakat, dan rekan satu timnya, juga tidak sungkan untuk bertanya. Ia membuktikan bahwa latar pendidikan yang berbeda dengan pekerjaannya bukanlah suatu halangan untuk berhasil, selama ada kemauan untuk belajar dari pengalaman, mengambil kesempatan dan mengembangkan diri. Motivasi terbesarnya untuk bekerja dengan masyarakat adalah rasa bangga dan haru ketika melihat hasil kerjanya dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Adanya perubahan positif terhadap pemahaman dan perilaku masyarakat karena kerja kerasnya bersama tim, menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. “Karena terlibat langsung dalam proses, maka ada rasa bangga dan haru ketika melihat apa yang kami usahakan dan kami sampaikan turut memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.



Programmer MDPI yang akrab disapa Baim ini telah bergabung sejak Oktober 2019. Meski termasuk pribadi yang pendiam, kemampuannya untuk cepat beradaptasi dan pemikirannya yang penuh ide menjadikan dirinya sebagai bagian penting dalam pengembangan *database* dan aplikasi pendataan MDPI. Sejak bergabung, Baim telah memperbaharui aplikasi I-Fish, termasuk pengembangan *dashboard* analisis data I-Fish, pengembangan *programming system* pelaporan data, dan pengaturan *database* I-Fish. Kemampuan analitik dan respon cepatnya terhadap ragam kendala pengembangan program, ditambah dengan pengetahuannya seputar arah dan fungsi pengembangan teknologi, menjadi ciri khasnya dalam terus memberikan inovasi teknologi *programming*. Sebagai pecinta lingkungan, bekerja di bidang perikanan membuatnya senang dapat menyajikan dan menyebarkan informasi tentang kondisi perikanan demi mendukung ekosistem perikanan yang lebih berkelanjutan.



Karen Villeda bergabung dengan MDPI di tengah masa transisi yayasan yang sedang berjalan, pandemi COVID-19 yang mulai mewabah, implementasi strategi baru dan ditutupnya beberapa proyek. Sikapnya yang ramah dan positif membuat proses transisi ini menjadi tampak mudah. Dengan pendekatannya yang mengutamakan pembelajaran, beragam ide dan pertanyaan yang kerap ia tawarkan saat diskusi turut mendorong tim MDPI untuk terus berpikir *out of the box*, dan memungkinkan kami untuk mencapai solusi yang lebih baik dalam implementasi program. Dengan mempercayai para rekannya, ia memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat berkinerja lebih baik.

MDPI memiliki tim dengan beragam keahlian, namun disatukan oleh keinginan untuk membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Seluruh tim MDPI turut memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan juga dapat membawa manfaat bagi komunitas nelayan kecil.



ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT WORKSHOP

Pada tahun 2019 MDPI memutuskan untuk mengubah pendekatannya melalui penyusunan rencana strategis yang baru. Proses pengembangan strategi 2020-2025 mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi demi mencapai tujuan untuk menjadi organisasi yang dapat bekerja secara berkelanjutan. Dalam masa transisi ini MDPI melakukan reformasi struktur dan mekanisme organisasi, termasuk meningkatkan kapasitas staf sesuai dengan visi-misi dari strategi baru. Untuk mendukung perkembangan ini, MDPI kemudian menyelenggarakan *workshop* bersama fasilitator eksternal, yang dihadiri oleh 35 staf dari semua lokasi kerja. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas MDPI yang didukung oleh The David and Lucile Packard Foundation for Organizational Effectiveness.

SEXUAL HARASSMENT WORKSHOP

Selama 5 tahun terakhir, permintaan akan Pelatihan Pelecehan Seksual di tempat kerja telah meningkat secara signifikan di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Sebuah instansi dinyatakan lalai, bilamana terjadi pelecehan seksual di tempat kerja dan mereka gagal mengambil langkah untuk melindungi karyawan yang dilecehkan. Demi mencegah terjadinya masalah seperti itu, setiap organisasi harus menyelidiki segala aduan pelecehan dan mengambil langkah yang efektif dalam mencegah kejadian berulang (termasuk penertiban atau pemutusan hubungan kerja pada karyawan). *Sexual harassment workshop* dapat membantu para atasan, termasuk manajer, untuk mengerti apa yang harus dilakukan jika mereka mengetahui atau mencurigai adanya pelecehan seksual di tempat kerja. Pelatihan seperti ini, didukung oleh kebijakan pencegahan pelecehan seksual, turut membuat karyawan merasa dihargai sekaligus menetapkan ekspektasi jelas terhadap perilaku karyawan. Terlepas dari apakah Undang Undang negara mewajibkan pelatihan pelecehan seksual atau tidak, organisasi yang cermat akan menilai pelatihan seperti ini sebagai sebuah investasi yang bijaksana. Sebagai organisasi dengan tim kerja yang beragam dan tersebar di berbagai lokasi, MDPI menyadari akan pentingnya pelatihan seperti ini bagi seluruh staf. Pelatihan yang diadakan di Bali dihadiri oleh 35 staf MDPI dari seluruh lokasi kerja.



TIM KERJA MDPI

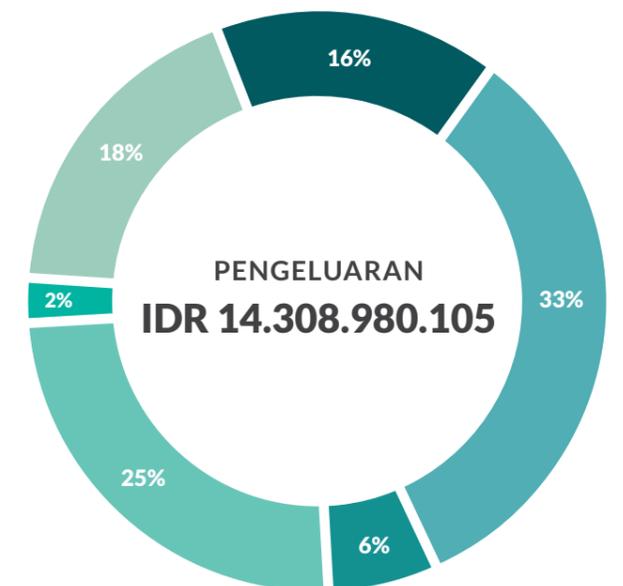
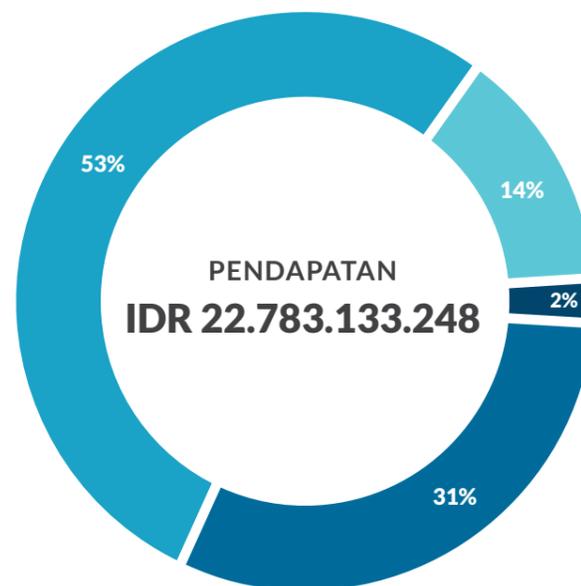
STAFF

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| A. Riza Baroqi | Herman Peudada |
| Ade Novia Putri | Hernot Reits Jon Loudoe |
| Agnesia Dau | Hizran Sampalu |
| Agustina Nilam Ratnawati | I Gusti Ayu Anastasia Sukma Putri |
| Ako Prasetyo | I Wayan Widiantara |
| Alief Dharmawan | Ibrahim Tauhid |
| Amrollah | Ida Ayu Adnyani |
| Antonius Witin | Iksan Bessy |
| Ardan Firmansyah | Janawi Akebai |
| Arif Sapril | Juchairi Azrin Yusuf |
| Arroyan Suwarno | Karel Yerusa |
| Arsandy Kaledupa | Karen T. Villeda Ortiz |
| Asis Buton | Kurniawan Eko Susetyo |
| Bachori Dhian Pratama | La Djamali |
| Bismirkin Hasja Marasabessy | Marwan Adam |
| Chirstian Banera | Muchdar Ayub |
| Eko Octavianus Chalim | Muh. Alwi |
| Eva Stephani C. Mangunsong | Muhamad Arman Ahmad |
| Gajali Fatrauba | Muhammad Subhan Murid |
| Gladys Giacinta Poluan | Muhammad Taeran |
| Hairul Hadi | Ni Made Artini |
| Hendri Heni Tiala | Novita Ayu Wulandari |

INTERN

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Prisillia Morley Loijens | Adjie Dharmasatya |
| Putra Satria Timur | Made Ory Sukerta |
| Rahman Pelu | Akiko Sabrina Sukardi |
| Riandi Habonaran | Kadek Bayu Candra Gotama |
| Ridwan Kamarullah | I Komang Darma Yasa |
| Rui Xavier Nunes | Kesya Eliana |
| Safiril Henaulu | Anis Nur Rahmawati |
| Sahril | Adjie Dharmasatya |
| Santri Dinalhusna | Nur Elviani Marasabessy |
| Saut Tampubolon | Dewi Kartika |
| Siti Zulaeha | |
| Sri Sumiati Jalil | |
| Sufira Audila Morotiya | |
| Thomas Morre Rodja Aso | |
| Umi Mandasari Tuasalamony | |
| Untung Ayudia Musli | |
| Wahyu Teguh Prawira | |
| Widi Artanti | |
| Wildan | |
| Yasmine Simbolon | |
| Yoon Pulu | |
| Yunita Mardiani | |

LAPORAN KEUANGAN



- Foundation
- Industry
- Public Funding & Multilateral
- Others

- Fundraising
- Fair Trade
- FCO
- Fisheries Improvement
- Supply Chain
- Operational





Laporan Tahunan 2020
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
www.mdpi.or.id